

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Pengembangan Desa Budaya di Kabupaten Kulon Progo

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan salah satu dari 4 yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa kewenangan khusus antara lain adalah dalam bidang kebudayaan. Salah satu upaya menjaga keistimewaan dalam bidang kebudayaan ini adalah melalui desa-desa budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam implementasi pengembangan desa budaya ini dapat dilihat dengan teori dari Cheema dan Rondenelli. Rondinelli dan Cheema (1983:30 dalam Yoyon Bahtiar Irianto), dalam implementasi kebijakan ini lebih menekankan kepada hubungan pengaruh faktor-faktor implementasi kebijakan desentralisasi terhadap lembaga daerah dibidang perencanaan dan administrasi pembangunan. Menurut Rondinelli dan Cheema, ada dua pendekatan dalam proses implementasi yang sering dikemukakan. Pertama, *the compliance approach*, yaitu yang menganggap implementasi itu tidak lebih dari soal teknik, rutin. Ini adalah suatu proses pelaksanaan yang tidak mengandung unsur-unsur politik yang perencanaannya sudah ditetapkan sebelumnya oleh para pimpinan politik (*political leaders*). Para administrator biasanya terdiri dari pegawai biasa yang tunduk kepada petunjuk dari para pemimpin politik tersebut. Kedua, *the political approach*. Pendekatan yang kedua ini sering disebut

sebagai pendekatan politik yang mengandung “*administration as an integral part of the policy making process in which policies are refined, reformulated, or even abandoned in the process of implementing them.*”

Dalam teori ini ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, pertama adalah Faktor kondisi lingkungan (*environmental conditions*) mencakup faktor seperti struktur politik nasional, proses perumusan kebijakan, infrastruktur politik, dan berbagai organisasi kepentingan, serta tersedianya sarana dan prasarana fisik. Suatu kebijakan ada hakekatnya timbul dari suatu kondisi lingkungan sosial-ekonomi dan politik yang khusus dan kompleks. Hal ini akan mewarnai bukan hanya substansi kebijakan itu sendiri, melainkan juga pula hubungan antar organisasi dan karakteristik badan-badan pelaksana di lapangan, serta potensi sumber daya, baik jumlah maupun macamnya. Struktur politik nasional, ideologi, dan proses perumusan kebijakan ikut memengaruhi tingkat dan arah pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu, karakteristik struktur lokal, kelompok-kelompok sosial budaya yang terlibat dalam perumusan kebijakan, dan kondisi infrastruktur.

Yang kedua adalah hubungan antar organisasi (*Inter-Organizational Relationship*), Rondinelli memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah memerlukan interaksi dan koordinasi dengan sejumlah organisasi pada setiap tingkatan pemerintahan, kalangan kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Faktor Ketersediaan sumber daya (*Resources for Program Impelementation*) dijelaskan bahwa kondisi lingkungan yang kondusif dalam

arti dapat memberikan diskresi lebih luas kepada pemerintah daerah, dan hubungan antar organisasi yang efektif sangat diperlukan bagi terlaksananya otonomi daerah. Sampai sejauhmana pemerintah lokal memiliki keleluasaan untuk merencanakan dan menggunakan uang, mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan rumah tangga sendiri, ketetapan waktu dalam mengalokasikan pembiayaan kepada badan/dinas pelaksana, kewenangan untuk memungut sumber-sumber keuangan dan kewenangan untuk membelanjakannya pada tingkat lokal juga mempengaruhi melaksanakan otonomi daerah seefektif mungkin. Adanya dukungan, baik dari pimpinan politik nasional, pejabat-pejabat pusat yang ada di daerah, maupun golongan terkemuka di daerah. Disamping itu, diperlukan dukungan administratif dan teknis dari pemerintah pusat. Kelemahan yang selama ini dijumpai di negara-negara sedang berkembang ialah keterbatasan sumber daya dan kewenangan pemerintah daerah untuk memungut sumber-sumber pendapatan yang memadai guna melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat.

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*), diutamakan kepada kemampuan para pelaksana di bidang keterampilan teknis, manajerial dan politik, kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi, maupun dukungan yang datang dari lembaga politik nasional dan pejabat pemerintah pusat lainnya. Hakikat dan kualitas komunikasi internal, hubungan antara dinas pelaksana dengan masyarakat, dan keterkaitan secara efektif dengan

swasta dan lembaga swadaya masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal yang sama pentingnya adalah kepemimpinan yang berkualitas, dan komitmen staf terhadap tujuan kebijakan (Rondinelli dan Cheema 1983:30 dalam Yoyon Bahtiar Irianto).

Dengan melihat 4 faktor tersebut, dapat dilihat bagaimana implementasi pengembangan desa budaya di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

### **1. Kondisi Lingkungan (*Environmental Conditions*)**

Penetapan desa budaya yang ada di Kulon Progo pertama kali pada tahun 1995. Awalnya desa budaya yang ada di kabupaten Kulon Progo berjumlah 10 desa budaya. Hal ini sesuai dengan SK Gubernur Nomor 325 tahun 1995. Kemudian setelah adanya Undang-Undang keistimewaan, desa budaya menjadi salah satu bentuk pengembangan budaya dan juga sebagai penopang keistimewaan DIY. Setelah keluarnya SK Gubernur nomor 262 tahun 2016, desa budaya di Kulon Progo bertambah menjadi 15 Desa budaya. Pada tahun 2016 pengembangan desa budaya yang ada di Kulon Progo di ambil alih oleh Dinas Kebudayaan DIY, yang pada tahun sebelumnya di naungi oleh Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Sehingga dinas kebudayaan Kulon Progo hanya bersifat kewilayahan. Hal ini seperti dikatakan oleh Bapak Joko Mursito, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kulon Progo yaitu :

*“Jadi desa budaya ini SKnya, SK gubernur otomatis yang mengawal secara detail ada di provinsi, kami hanya sebatas karena kewilayahan. Kalau dulu dikelola oleh kabupaten masing-masing, sekarang sudah mulai diambil alih kembali oleh provinsi. Peran Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, hanya selaku yang mewilayahi, yang mengelola kewilayahan, kita untuk membina, memovitasi, tetapi dari sisi penganggaran ini tidak diperbolehkan mengeluarkan untuk kegiatan yang sudah diampu*

*sana.*” (wawancara dengan Bapak Joko Mursito selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kulon Progo, tanggal 8 Februari 2017)

Desa budaya adalah bentuk konkrit dari pelestarian aset budaya. Pada konteks ini, desa budaya mengandung pengertian adalah sebagai wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensi budayanya dan menkonservasi kekayaan budaya yang dimilikinya. Status desa budaya juga mengandung makna penguatan regulasi dan penyusunan pondasi kebijakan yang mempermudah dan menjamin pelaku-pelaku di bidang kebudayaan dalam melestarikan dan mengembangkan potensi budaya lokal sehingga menumbuhkembangkan ketahanan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Sejumlah kendala masih ditemukan dalam melaksanakan pelestarian budaya lokal melalui desa budaya seperti persoalan sumberdaya manusia, kelembagaan dan sarana pra-sarana (Rochayanti & Triwardani, dalam Reny Triwardani dan Christina Rochayanti, 2014 hal 104). Kebudayaan yang ada di Desa budaya di Kulon Progo terdiri dari 4 unsur yaitu :

**a. Tradisi dan Adat Istiadat**

Kegiatan adat istiadat yang ada di Kulon Progo adalah warisan dari nenek moyang dan sudah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini masih berlangsung dan dilaksanakan hingga sekarang. Adat

istiadat ini mempunyai keragaman antar daerah di Kulon Progo, bisa sebuah adat memperingati pahlawan desa, atau suatu kejadian yang ada di desa budaya, selain itu adat istiadat ini juga mempunyai keragaman sesuai dengan letak geografis desa budaya. Seperti di desa budaya Bugel yang terletak di daerah pesisir laut, di daerah ini terdapat upacara adat sedekah laut. Sedekah laut ini biasanya dilaksanakan setahun sekali pada bulan Suro kalender jawa. Upacara adat sedekah laut ini dimaksudkan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar para nelayan diberikan keselamatan. Sedekah laut ini berupa berbagai macam makanan atau sesaji yang sudah dibacakan doa oleh tokoh agama yang ada di desa budaya, kemudian sesaji ini dihanyutkan ke Laut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ngadi Sunaryo ketua desa budaya Bugel yaitu :

*“Sedekah laut itu bertempat di TPI itu ya bulan Suro, kemarin juga cukup meriah yang datang juga banyak, karena setiap bulan suro kan ya disamping peringatan kelahiran Nabi itu juga kita mohon doa, mohon keselamatan dengan sedekah laut, jadi ada sesaji macam macam itu lalu di doa doai, lalu dilarung ke laut, ininya mohon keselamatan agar nelayan nelayan selamet.” (wawancara dengan Bapak Ngadi Sunaryo ketua desa budaya bugel, tanggal 8 Februari 2017)*

Adat istiadat lainnya adalah tingkep tandur dan wiwitan. Di ada di daerah yang mayoritas wilayahnya adalah pertanian. Upacara adat tinkep tandur ini bertujuan untuk meminta kepada Allah agar tanaman padi bisa berhasil dengan baik. Sedangkan untuk wiwitan adalah dimaksudkan agar hasil panen dapat melimpah dan mendapat barokah.

Wiwitan juga sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena petani sudah diberikan panen padi yang bagus dan melimpah. Upacara adat ini dilangsungkan setiap menjelang panen dan juga sesudah panen. Untuk wiwitan ini melibatkan para petani dan juga bersama pemerintah desa yang ada di desa budaya itu sendiri.

Kemudian tradisi yang masih bertahan dari dulu hingga sekarang adalah bersih desa. Bersih desa ini dilakukan oleh setiap desa yang ada di Kulon Progo. Tradisi bersih desa ini biasanya dilakukan setiap setahun sekali. Dalam tradisi bersih desa ini masyarakat desa budaya melakukan kerja bakti bersih-bersih area desanya masing-masing, bersih desa ini mencakup membersihkan makam, sendang, talut, petilasan, dan cagar budaya yang dimiliki oleh masing-masing desa budaya. Hal seperti yang dijelaskan oleh bapak Ambardi selaku ketua desa budaya Tuksono, yaitu:

*“Mengadakan bersih desa secara rutin sejak nenek moyang sampai sekarang belum putus, itu habis panen padi rendengan istilah e itu diadakan acaranya sekitar 3 hari 2 malam, biasanya ada kerja bakti bersih-bersih dimakam, di sendang dll, kemudian malam sabtu pengajian atau mujadahan kemudian malam minggunya untuk pembukaan itu ada kesenian tayub ledek itu,”*(wawancara dengan bapak Ambardi ketua desa budaya Tuksono 21 Februari 2017 )

Berikut ini daftar adat dan tradisi yang ada di Kulon Progo :

**Tabel 3.1**

**Adat dan Tradisi di Kulon Progo**

No	Nama tradisi dan adat istiadat	Tujuan	Waktu pelaksanaan
1	Ki Daruno Ni	Upacara adat ini	setiap bulan

	Daruni	bertujuan untuk memperingati pendiri cikal bakal Desa Bugel.	Suro
2	Upacara Sedekah Laut	Sedekah laut bertujuan untuk meminta keselamatan kepada Allah bagi nelayan,	setiap setahun sekali
3	Tingkep tandur	Memohon kepada Allah agar tanaman padi bisa berhasil baik	Selesai menanam padi
4	Wiwitan	Memohon kepada Allah agar hasil panen dapat melimpah dan mandapat barokah.	Setelah padi tua atau hampir dipanen
5	Ruwahan	Mendoakan arwar para leluhur	Ditentukan oleh warga
6	Merti desa	Bersyukur atas nikmat yang diberikan dan memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Setiap setahun sekali
7	Nggumbregi/ kupatan	Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa ternak-ternak yang ada untuk menggarap sawah bisa sehat dan selamat, serta mendapat hasil panen dengan bagus`	Setelah panen padi yang ke-2
8	Bedhah bumi	Memohon kepada tuhan agar para petani dalam menggarap sawah mendapat keselamatan	Sebelum menggarap sawah

Sumber : dirangkum dari profil-profil desa budaya Kabupaten Kulon Progo tahun 2016

Tradisi lain yang ada di desa budaya di Kulon Progo adalah tradisi daur hidup manusia, mulai dari manusia itu lahir menikah, mempunyai anak hingga meninggal dunia. Tradisi daur hidup dari yang ada di Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.2**

**Adat Dan Tradisi Daur Hidup Manusia Di Kulon Progo**

No	Nama	Tujuan	Prosesi
1	Tingkeban atau mitoni bagi ibu yang mengandung 7 bulan	Memohon keselamatan kepada Allah agar kandungan beserta ibunya dapat sehat dan selamat	Kenduri dan doa
2	Brokohan	Memohon keselamatan kepada Allah agar bayi yang dilahirkan sehat	Doa dan makan bersama
3	Tedak siten	Memohon keselamatan kepada Allah untuk anak yang akan mulai bisa berjalan	Doa dan makan bersama
4	Membuang kembar mayang dan injak telur pada pernikahan	Mengisyaratkan bahwa orang yang sudah menikah berarti membuang status bujang dan perawan	Kembar mayang dibuang oleh anak yang masih suci. Telur ditempelkan ke jidad kemudian di injak oleh mempelai pria, selanjutnya mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria
5	Sepasar manten	Memohon keselamatan kepada Allah agar pernikahan selamat dan langgeng	Kenduri dan doa bersama

6	Sur tanah bagi orang yang meninggal	Memohon ampunan kepada Allah agar orang yang meninggal dapat kembali di tanah asal	Menggali kuburan dengan diawali doa
7	3, 7, 40, 100 hari mendak pisan, mendak pindo dan nyewu atau 1000 hari bagi orang yang telah meninggal	Memohon ampun kepada Allah agar semua kesalahan dapat diberi maaf dan semua amal kebaikan dapat diterima sebagai amal.	Kenduri dan doa bersama

Sumber : dirangkum dari profil-profil desa budaya kabupaten Kulon Progo tahun 2016

#### b. Kesenian

Di Kulon Progo terdapat beberapa kesenian unggulan dan menjadi ikon Kulon Progo. Beberapa diantaranya seperti tari Oglek. Tari ini asli dari Kulon Progo yaitu di Desa Tuksono. Penari dalam tari Oglek berjumlah orang. Dalam tarian ini diiringi dengan musik karawitan dan terdapat seorang pawang. Tari oglek ini hampir mirip dengan jathilan tetapi perbedaannya terletak pada jumlah penarinya. Tarian ini kemudian juga berkembang ke desa-desa lain yang berada di Kulon Progo. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Juwari, Kasie Kemasyarakatan Desa Tuksono, yaitu :

*“Oglek itu penarinya 4 ada pengrawit dan ada pawangnya, itu adalah satu-satunya Tuksono yang menciptakan tari Oglek bahkan sebagai ikon Sentolo, penciptanya juga dari Tuksono. Kemudian kelompok-kelompok yang ada itu ada di Mbulak itu dulu penciptanya itu Pak Notosunaryo, dulu sebelum menjadi pamong desa dia menciptakan tari Oglek.”* (wawancara dengan Kasie Kemasyarakatan desa Tuksono, 9 Februari 2017)

Tarian Oglek ini juga pernah mempunyai prestasi sendiri. Tari Oglek ini pernah dipentaskan dengan dibuatkan acara 100 penari Oglek. Acara ini dilaksanakan di daerah pinggir sungai progo. Tari Oglek ini juga pernah dipentaskan di alun-alun Kulon Progo pada acara penutupan Porda. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ambardi ketua desa budaya Tuksono, yaitu:

“Dulu pernah dibuat acara masal itu 100 penari oglek di pinggir kali progo, ramai sekali itu. Terus ganti hari itu dibawa ke alun-alun pas untuk penutupan porda” (wawancara dengan bapak Ambardi ketua desa budaya Tuksono, 21 Februari 2017)

Kesenian yang berasal dari Kulon Progo lainnya adalah Tari angguk. Tari ini juga asli kreasi dari Kulon Progo, salah satunya yang ada di desa Hargomulyo. Tarian ini sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat Kulon Progo dan juga menjadi ikon Kulon Progo. Tari Angguk ini juga merupakan salah satu kesenian tertua yang ada di Kulon Progo. Terdapat dua jenis dalam tari angguk ini ada tari angguk putra dan tari angguk putri. Tari angguk yang ada di desa budaya Hargomulyo bahkan sudah pernah tampil di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Triharyono, Kasie Kemasyarakatan desa Hargomulyo yaitu :

*“Untuk kesenian yang menonjol antara lain angguk, angguk putra putri itu bisa dikatakan asli dari desa. Angguk putrinya sri panglaras angguk putranya itu al amin itu sudah sangat terkenal atau sudah cukup diapresiasi oleh masyarakat, ataupun pemerintah bahkan sudah beberapa kali tampil di Taman mini ataupun Jakarta.”* (wawancara dengan bapak Triharyono Kasie Kemasyarakatan desa Hargomulyo, 23 Februari 2017)

Kesenian yang menonjol lainnya adalah kesenian keroncong yang salah satunya ada di desa budaya Bugel. Kesenian keroncong di desa budaya bugel ini sudah cukup terkenal dan menjadi ikon desa dan juga kecamatan. Kesenian keroncong di desa budaya bugel ini juga sudah cukup berprestasi dan juga sering diundang untuk mengisi acara baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wuryanto, Kasie Kemasyarakatan desa Bugel yaitu :

“Lalu ada kesenian unggulan di tingkat kecamatan ada keroncong yang namanya keroncong tunas muda pimpinan Pak Supradi. Itu sudah jadi ikon desa ikon kecamatan, itu sudah sering kali tampil kabupaten, provinsi tamu kehormatan di provinsi, kejuaraan kejuaraan sudah mengikuti akta pendirian juga sudah ada.” (wawancara dengan Bapak Wuryanto, selaku Kasie Kemasyarakatan desa Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Kesenian umum lainnya yang ada di Kulon Progo antara lain seperti jathilan, kethoprak, keroncong, gejog lesung, karawitan dan wayang kulit. Selain kesenian yang bersifat umum, di Kulon progo terdapat Juga kesenian yang bersifat agama atau religius. Kesenian juga banyak di kulon progo, kesenian yang bersifat keagamaan ini tersebar dalam kelompok-kelompok yang ada di setiap dusun yang ada di desa-desa budaya di Kulon Progo. Seperti di desa budaya Bugel yang memiliki kelompok hadroh dan sholawatan yang tersebar di setiap pedukuhan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Ngadi Sunaryo Ketua desa budaya Bugel yaitu:

“Kemudian ada hadroh ada di pedukuhan 5 al kasani, terus sholawat nabi itu hampir setiap pedukuhan, pedukuhan,3,2,6.”

(wawancara dengan bapak Ngadi Sunaryo selaku Ketua desa budaya Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Kesenian yang bersifat keagamaan ini juga sudah lama ada di Kulon Progo. Kesenian ini sudah ada sejak tahun 1985 dan masih aktif hingga sekarang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Umar Sanusi Ketua desa budaya Hargomulyo yaitu :

“Setelah tahun 85 itu semakin di intensifkan digiatkan kembali sehingga sekarang ini desa budaya memiliki kelompok kelompok kesenian baik yang religius maupun yang umum, seperti direligius islami itu ada 15 kelompok sholawatan, 2 rebana, 1 hadroh,” (wawancara dengan bapak Umar Sanusi ketua desa budaya Hargomulyo, tanggal 23 Februari 2017)

**c. Kuliner**

Kulon Progo juga mempunyai kuliner tradisional yang masih ada hingga sekarang. Kuliner tradisional ini bisa di temukan di pasar-pasar tradisional yang ada di Kulon Progo. Beberapa kuliner yang khas dari Kulon Progo seperti gebleg, tempe benguk, growol, cenil dan cenot. Di Kulon Progo juga terdapat sentra industri pembuatan tahu. Salah satu yang terdapat di desa Tuksono.

**d. Kerajinan**

Kerajinan-kerajinan yang ada di Kulon Progo terbuat dari bahan baku dari alam. Bahan ini seperti eceng gondog yang dapat dibuat menjadi berbagai macam kerajinan seperti tas, keset, maupun souvenir lainnya. Bahan alam yang digunakan lainnya adalah dari daun pandan yang diolah menjadi tempat tisu, hiasan dinding, maupun tempat

sampah. Kerajinan lain yang masih terjaga adalah pembuatan wayang kulit yang masih terjaga hingga sekarang.

Salah satu nilai luhur atau budaya yang masih tertanam dalam masyarakat desa budaya di Kulon Progo adalah gotong royong. Gotong royong adalah salah satu budaya khas Indonesia yang sarat akan nilai luhur, sehingga sangat perlu untuk dijaga dan dipertahankan. Didalamnya terdapat nilai yang luhur, sehingga harus tetap ada, dan terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat kedudukan seseorang tetapi lebih melihat pada keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan yang ada di masyarakat. Gotong royong yang telah ada di Indonesia dari dulu tentunya tidak hanya ada di satu daerah, namun menyebar di semua wilayah di Indonesia. (Puput Anggorowati dan Sarmini,2015)

Budaya Gotong royong ini menjadi faktor pendukung yang cukup penting dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo ini. Hal ini dikarenakan masih banyak kegiatan yang dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat baik yang bersifat sosial ataupun individual. Dampak dari budaya gotong royong ini cukup besar dalam pengembangan desa-desa budaya yang ada di Kulon progo. Dengan gotong royong masyarakatan dapat menopang berbagai kegiatan yang ada di desa budaya dan dapat meringankan pekerjaan serta dapat mempererat silaturahmi atau hubungan antar masyarakat.

Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan dengan gotong royong adalah seperti kegiatan sosial yang dilakukan dengan cara gotong royong ini adalah pembangunan jalan di desa. Masyarakat membangun jalan secara bersama-sama. Salah satu contohnya adalah seperti di desa Budaya Bugel, dimana masyarakat desa gotong royong untuk membangun talut jalan yang ada di desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ngadi Sunaryo ketua Desa Budaya Bugel yaitu:

“Gotong royong masih, contoh pembangunan talut jalan, dana dari desa tapi pengerjaannya oleh semua warga, kemudian dijadwalkan setiap hari ada yang datang baik pagi maupun sore. Itu gotong royong yang sifatnya kepentingan umum,” (wawancara dengan Bapak Ngadi Sunaryo selaku Ketua desa budaya Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Dengan adanya gotong royong ini juga dapat menghemat anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan jalan. Warga secara sukarela datang untuk gotong royong membangun jalan di desanya, bahkan satu keluarga terdapat lebih dari satu orang yang ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong pembangunan jalan ini, hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Umar Sanusi, ketua desa budaya Hargomulyo yaitu :

*“Alhamdulillah ya gotong royong di desa kami ini masih sangat kental seperti misalnya bantuan jalan konblok, disitu padat karya ada biaya,” wes biaya rasah jupuk tapi untuk memperpanjang untuk meperbesar volume”. Dan itu kerja bakti itu tidak kok namanya satu keluarga ngirim satu enggak, kalau bisa ngirim tiga ya ngirim tiga, ayahnya, ibunya, anaknya kalau gotong-royong disini masih sangat utuhlah tidak seperti dikota-kota. Kalau kadang mendapat bantuan kanterpatnya melebihi dari bantuannya kalau dithitung meskipun wujudnya tenaga.”* (wawancara dengan

bapak Umar Sanusi ketua desa budaya hargomulyo, tanggal 23 Februari 2017)

Untuk gotong royong yang sifatnya individual adalah ketika ada salah satu warga desa yang mempunyai suatu hajat masyarakat ikut membantu dalam kegiatan tersebut. Misalnya jika ada warga yang akan merenovasi rumahnya, maka warga yang ada di desa akan ikut membantu untuk merenovasi rumah tersebut. Contoh lainnya adalah seperti acara pernikahan, warga desa datang untuk membantu acara pernikahan yang dilakukan oleh salah satu warga desa. Warga saling membagi tugas dalam acara pernikahan tersebut, seperti ada sebagian warga membantu untuk memasak, kemudian ada warga lainnya yang melayani tamu dan juga ada yang menjadi sebagai penyambut tamu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ngadi Sunaryo ketua desa budaya Bugel yang menyatakan bahwa.:

“Kemudian untuk gotong-royong yang sifatnya perorangan itu masih ada seperti laden, tarub. Dari yang masak yang membuat teh, sampai yang laden masih dilakukan oleh warga.” (wawancara dengan Bapak Ngadi Sunaryo ketua desa budaya bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Purnomo selaku ketua desa budaya Tanjungharjo, yang menyatakan :

“Terus nek gotong royong yo kalau dikampung itu masih banyak gotong royong dalam artia kalau ada orang yang rehab rumah itu masih dilakukan gotong royong sama tetangga kalau di kotakan sudah tidak ada kalau gotong royong, bantu orang rehab rumah



itu, kalau di desa atau dikampungkan masih banyak.” (wawancara dengan Bapak Purnomo selaku ketua desa budaya Tanjungharjo, tanggal 24 Februari 2017)

Gotong royong ini merupakan salah satu budaya yang masih terjaga hingga sekarang, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di daerah perkotaan yang sudah mulai jarang ditemui budaya gotong royong dalam masyarakat. Masyarakat sekarang ini terutama di daerah perkotaan mulai kehilangan budaya gotong royong ini karena banyak masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhannya sendiri, ini juga dikarenakan budaya luar yang masuk kedalam masyarakat, sehingga budaya yang sudah dimiliki mulai hilang. Salah satu contohnya adalah seperti masyarakat di daerah kota yang lebih memilih memesan katering untuk acara pernikahan ataupun memakai tukang bangunan untuk merenovasi rumah mereka, dibandingkan dengan mengerjakannya bersama-sama dengan para tetangga.

Budaya gotong royong yang dilakukan masyarakat ini mempunyai banyak manfaatnya, seperti pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan mempercepat waktu penyelesaian. Dengan adanya gotong royong ini juga dapat menghemat anggaran yang digunakan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Umar Sanusi diatas, sehingga dana dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Budaya gotong royong ini juga dapat mempererat persaudaraan dan persatuan di antara masyarakat.

Di desa budaya Kulon Progo masih terdapat bangunan-bangunan peninggalan zaman dahulu, peninggalan ini masih terjaga hingga sekarang dan sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya acara adat istiadat ini. Bangunan ini seperti sumur yang dikeramatkan, petilasan, sendang, dan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wuryanto, Kasie Kemasyarakatan Desa Bugel, yaitu:

“Potensi daerah sini yang menjadi ikon disini ada petilasan kidaruno nidaruni, dari situ sentra petilasan kegiatannya disitu ada upacara adat kidaruno nidaruni itu biasanya setiap suro, juga setiap ada permintaan dari instansi terkait, sentranya di pedukuhan 10 kegiatannya melibatkan semua pedukuhan.” (wawancara dengan Bapak Wuryanto selaku Kasie Kemasyarakatan Desa Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Dalam melaksanakan kegiatan kesenian ini desa-desa budaya juga ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana seperti alat-alat gamelan, alat-alat musik, kostum atau pakaian penunjang kegiatan kesenian. Dalam pelaksanaan kesenian di desa budaya di Kulon Progo ini juga di topang oleh beberapa sanggar-sanggar yang ada di masing-masing desa budaya. Sanggar-sanggar ini digunakan sebagai sarana pengembangan potensi seni atau sebagai tempat latihan kesenian yang ada di desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Umar Sanusi Ketua desa budaya Hargomulyo yaitu:

“Di hargomulyo ya difasilitasi dengan yang ada ini kemudian ada sanggar sanggar sendiri kemudian juga tempat tempat kepala dukuh untuk kelompok kelompok di pedukuhan.” (wawancara dengan Bapak Umar Sanusi selaku Ketua desa budaya Hargomulyo, tanggal 23 Februari 2017)

Beberapa desa budaya juga sudah memiliki gamelan sendiri, namun kualitas dari gamelan tersebut masih berbahan dasar dari besi, sehingga kualitas dari gamelan tersebut masih kurang baik. Beberapa desa budaya bahkan belum memiliki alat atau gamelan sendiri. Penggunaan gamelan di beberapa desa budaya masih menggunakan gamelan milik pribadi atau warga yang memiliki gamelan sendiri, gamelan milik pribadi ini juga sudah ada yang memiliki kualitas yang baik yang berbahan dasar dari perunggu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Juwari Kasie Kemasyarakatan desa Tuksono, yaitu:

“gamelan sudah ada walaupun memang gamelannya sangat sederhana. namun untuk gamelan yang milik pribadi juga sudah ada yang bagus perunggu itu sudah ada, namun untuk kelompok-kelompok lain itu baru kuningan atau besi” (wawancara dengan bapak Juwari selaku Kasie Kemasyarakatan desa Tuksono, tanggal 9 Februari 2017)

Dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah dalam hal sumber daya manusia untuk pelaku seni maupun dalam pelaksanaan kegiatan budaya lainnya. Rata-rata pelaku kebudayaan yang ada di desa budaya masih didominasi oleh para orang tua. Sementara untuk para generasi muda yang ikut melestarikan budaya masih sedikit. Kurangnya dalam hal regenerasi ini merupakan salah satu penghambat dalam faktor kondisi lingkungan ini. Karena dengan adanya regenerasi yang baik dapat menjaga agar kegiatan budaya yang ada di desa budaya menjadi tetap terjaga hingga masa yang akan datang. Contohnya

seperti ketika desa akan mengadakan pertunjukan seni, para pelaku atau penampil mayoritas diisi oleh orang yang sudah tua. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kebudayaan yang ada dan juga desa budaya akan menjadi sulit berkembang terutama dalam hal regenerasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ngadi Sunaryo ketua desa budaya Bugel, yaitu

“Tapi untuk mencari generasi penerus untuk melestarikan kesenian itu memang agak sulit, seperti mencari anak anak yang mau belajar menari, belajar karawitan itu susah, kemudian kethoprak juga susah itu yang anak anak muda itu.” (wawancara dengan bapak Ngadi Sunaryo selaku ketua desa budaya bugel, tanggal 8 Februari 2017 )

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ambardi selaku ketua desa budaya Tuksono yaitu :

*“Agak susah e mas kalau pemuda tapi sebagian juga ada yang respon untuk budaya itu, agak kesulitan untuk mengajak, agak berat untuk latihan. Biasanya yang sering tampil ya yang tua tua yang muda itu presentasinya kecil, ya nanti mudah mudahan dengan suntik suntikan dana dapat menggugah anak anak ataupun remaja lebih bergairah lagi.”* (wawancara Bapak Ambardi ketua desa budaya tuksono, tanggal 21 Februari 2017).

Kendala lainnya dalam pengembangan desa budaya yang ada di Kulon Progo ini adalah dalam hal anggaran. Dalam kegiatan yang ada di desa budaya masih mengandalkan dana dari dinas baik kabupaten maupun dari provinsi. Seringkali dana yang diberikan oleh dinas tidak cukup untuk kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh desa budaya. Hal ini juga karena anggaran yang ada di desa atau APBdes juga terbatas. Dalam

pelaksanaan program yang akan dijalankan di desa budaya menjadi terkendala dan pengembangan desa budaya menjadi terhambat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Purnomo, ketua desa budaya Tanjungharjo yaitu :

*“Kendala yo cuman itu, cuman anggaran karena desa budaya tanjungaharjo itu setiap ada event anggaranya hanya anggaran dari dinas baik itu dinas kebudayaan DIY maupun dinas kebudayaan kabupaten. Jadi kalau kita mau memprogramkan yang muluk-muluk yang banyak itu tidak berani karena nanti jangan jangan kita nanti hanya memuat program tapi tidak bisa tereliasasikan mubazir karena terpancang anggaran. Kalau pemdes bisa menganggarkan otomatis kita sudah bisa untuk merencanakan kegiatan ini pada bulan ini itu bisa, tapi berhubung pemdes tidak bisa menganggarkan untuk desa budaya kita programnya ya yang sederhana dulu, kira-kira yang nanti bisa berjalan dan membutuhkan biaya yang kecil dan ringan.”*  
(wawancara dengan bapak Purnomo, ketua desa budaya Tanjungharjo, tanggal 24 Februari 2017)

Hal yang sama juga terjadi di desa budaya Tuksono. Anggaran yang diberikan oleh dinas untuk kegiatan pentas pertunjukan yang diadakan oleh desa budaya masih kurang. Kekurangan ini terutama untuk operasional dalam menyelenggarakan pentas budaya. Dalam melaksanakan kegiatan latihan rutin di desa budaya juga masih menggunakan dana swadaya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ambardi ketua desa budaya Tuksono, yaitu:

*“Kendalanya yo sering sering ini mas kalau mengadakan pentas terus dana itu sering kurang, desa sering nombok, misalnya mau pentas ya dapat dana tapi kurang kalau untuk operasionalnya itu sering sering kurang. Kalau untuk latihan rutin e swadaya itu. Biaya latihan kan gak ada kalau desa budaya nganu sekian, tidak*

*terperinci untuk ini gak ada. Sering sering ya pengurus dan bekerjasama dengan desa cari sumber lain untuk menopang kekurangan-kekurangan.” (wawancara dengan bapak Ambardi selaku ketua desa budaya Tuksono, tanggal 21 Februari 2017)*

Pada Kondisi Lingkungan dalam implementasi pengembangan desa budaya di Kulon Progo ini Dinas Kebudayaan DIY adalah yang menaungi kebijakan kebudayaan yang ada di Yogyakarta termasuk desa-desa budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo, semua program dan kegiatan dibuat oleh dinas kebudayaan DIY. Sementara untuk Dinas Kebudayaan Kulon Progo hanya sebagai kewilayahaan. Kondisi kebudayaan desa-desa budaya di Kulon Progo juga masih terjaga hingga sekarang seperti upacara adat yang masih sering dilaksanakan, begitu juga dengan kesenian-kesenian yang masih sering diselenggarakan. Kebudayaan lainnya yang masih berlangsung terus di masyarakat adalah budaya gotong royong.

Meskipun kebudayaan yang ada di desa-desa budaya masih terjaga tetapi untuk regenerasi atau generasi penerus di kebudayaan masih kurang. Partisipasi dari generasi muda yang ada di desa budaya masih belum terlalu banyak. Para pelaku seni terutama mayoritas masih dilakukan oleh masyarakat dari kalangan orang tua. Sarana penunjang untuk kegiatan di desa budaya di Kulon Progo juga masih kurang memadai. Beberapa desa belum memiliki tempat khusus untuk pengembangan kebudayaan, seperti belum adanya balai budaya untuk berbagai kegiatan kesenian. beberapa

desa juga belum memiliki kostum untuk kegiatan kebudayaan dan juga peralatan yang masih kurang memadai.

## **2. Hubungan Antar Organisasi (*Inter-Organizational Relationship*)**

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program membutuhkan interaksi dan koordinasi sejumlah besar organisasi pada level yang berbeda dalam pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hubungan dan kerjasama yang baik ini juga harus terjalin dengan instansi di luar pemerintahan seperti organisasi atau lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan antar instansi di pemerintah adalah hubungan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan DIY dengan Pemerintah Daerah Kulon Progo yaitu Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo dinas kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran untuk membina, memotivasi, fasilitator, dan mobilisator. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Markus Suarisman Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY yaitu:

*“Perannya pemerintah membantu desa budaya untuk bisa mandiri dalam arti bisa mengkondisikan seni budaya masyarakat secara mandiri, dengan beberapa kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi, itukan disamping kita sebagai motivator kita juga sebagai fasilitator dan mungkin juga sebagai mobilisator disana. Karena desa budaya itu adanya di wilayah kabupaten kita kerjasamanya dengan kabupaten, di tingkat daerahkan kita tidak punya wilayah basiknya di kabupaten, yang punya masyarakat kabupaten, yang punya lahan juga kabupaten, kita hanya punya teritorinya saja, hak penuh di kabupaten, kita hanya sebagai fasilitator, mobilisator, motivator.”* (wawancara dengan bapak Markus Suarisman selaku Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, tanggal 13 Februari 2017)

Sedangkan untuk Dinas Kebudayaan Kulon Progo mempunyai peran yang hampir sama dengan Dinas Kebudayaan DIY. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Mursito, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kulon Progo yaitu :

*“Jadi desa budaya ini Sknya SK gubernur otomatis yang mengawal secara detail ada di provinsi, kami hanya sebatas karena kewilayahan. Kalau dulu dikelola oleh kabupaten masing-masing, sekarang sudah mulai diambil alih kembali oleh provinsi. Peran dinas kebudayaan kabupaten, otomatis kami selaku yang mewilayahi, yang mengelola kewilayahan kita untuk membina, memotivasi, tetapi dari sisi penganggaran ini tidak diperbolehkan mengeluarkan untuk kegiatan yang sudah diampu sana.”*  
(wawancara dengan Bapak Joko Mursito, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kulon Progo, tanggal 8 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas kedua dinas ini mempunyai peran yang hampir sama dalam pengembangan desa budaya yang ada di Kulon Progo. Kedua dinas ini sama-sama memiliki peran untuk membina, memotivasi, fasilitator, dan mobilisator desa budaya di Kulon Progo. Tetapi kedua dinas ini mempunyai perbedaan dalam beberapa hal. Perbedaan ini terdapat pada sisi penganggaran yang dimana pengeluaran anggaran ini berada pada Dinas Kebudayaan DIY. Sedangkan peran Dinas Kebudayaan Kulon Progo adalah yang mengelola kewilayahan karena wilayah desa budaya berada pada tingkat kabupaten, sedangkan Dinas Kebudayaan DIY tidak mempunyai kewilayahan di desa-desa budaya tetapi hanya sebatas teritori saja. Untuk menjaga hubungan dan sebagai tempat menampung aspirasi dari masyarakat yang ada di desa budaya, Dinas Kebudayaan DIY membentuk pengelola desa budaya. Pengelola



desa budaya untuk menampung apa yang diinginkan oleh masyarakat desa budaya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Markus Suarisman Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, yaitu :

*”Itu sudah tersirat di pengelola desa budaya, kita membuat pengelola desa budaya itu maksudnya supaya bisa memajukan seni budaya itu sesuai kehendak masyarakat, masyarakat disana mau apa, itu pengelola nanti yang merumuskan dan nanti bisa diintegrasikan dengan program kerja pendampingan seni budaya di masyarakat, jadi apa yang dikehendaki masyarakat, itu bisa bersama sama dengan pendamping seni budaya di masyarakat, secara sinergi kerjanya.”*(wawancara dengan Bapak Markus Suarisman selaku Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, tanggal 13 Februari 2017)

Dari hasil wawancara diatas bahwa dibentuknya pengelola desa budaya ini diharapkan mampu menampung aspirasi atau kehendak dari masyarakat di desa budaya dan dapat melihat potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Sehingga program dan kegiatan yang dijalankan dapat berjalan bersamaan dan sejalan dengan program yang ada di Dinas Kebudayaan DIY, sehingga dapat memajukan desa budaya yang ada. Untuk menyerap dan menampung keinginan dari masyarakat desa budaya ini, Dinas Kebudayaan DIY mengadakan pertemuan atau workshop dengan pengelola desa budaya dan para pelaku seni yang ada di desa-desa budaya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Wuryanto Kasie Kemasyarakatan Desa Bugel yaitu :

*“Itu kalau sudah positif kegiatan kita diajak seperti TM untuk kearah pelaksanaan bukan kearah kebijakan. Cuma untuk yang kebijakan biasanya serapannya lewat workshop yang mereka gelar itu kan pelaku seni akan diundang dan nanti disitulah selain untuk meningkatkan kapasitas pelaku seni, disitu juga ada timbal balik dari pelaku seni,”* (wawancara dengan Bapak Wuryanto selaku kasie Kemasyarakatan desa budaya bugel)

Dengan adanya workshop ini diharapkan kemampuan dari para pelaku seni yang ada di desa budaya dapat meningkat sehingga dapat mengembangkan desa budaya di daerahnya menjadi lebih baik, selain itu pelaku seni juga dapat menyampaikan apa yang diinginkan dan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan desa budaya di didaerahnya. Selain adanya workshop ini pengurus desa budaya juga diundang oleh Dinas Kebudayaan untuk mengikuti studi banding ke beberapa daerah lainnya. Tujuan dari studi banding ini adalah untuk melihat bagaimana pengembangan desa budaya di daerah lain. Selain berkordinasi dengan dinas kebudayaan pengurus desa budaya juga selalu berkordinasi dengan pemerintah desa. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ngadi Sunaryo ketua desa budaya Bugel yaitu :

*“Kalau kita selalu kordinasi dengan pemerintah desa, kalau ada apa apa, kegiatan, event selalau dialog dengan pemerintah desa. Ya sering kita diundang untuk workshop. workshop itu sering, di DIY. Sering dipanggil untuk workshop, studi banding. Studi banding sudah diajak ke Banyuwangi, ke Bali, yang terakhir kemarin ke suku badui di Banten.”* (wawancara dengan Bapak Ngadi Sunaryo selaku ketua desa budaya Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Dalam pengembangan desa budaya ini juga dibutuhkan hubungan dan kerjasama yang baik ini yang terjalin antara pemerintah desa, pengelola desa dan masyarakat yang ada desa budaya. Hubungan yang baik antar pemerintah desa dengan desa budaya, maupun dalam lingkup desa budaya itu sendiri, menjadi salah satu faktor pendukung untuk pengembangan desa budaya itu sendiri. Dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan pengelola desa budaya maupun dengan masyarakat sendiri, kegiatan atau program yang sudah di rencanakan dapat dijalankan dengan baik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Umar Sanusi, ketua desa budaya Hargomulyo yaitu :

*“Akrab ya, struktur pengurus desa budaya itu kepengurusannya berdasarkan keputusan kepala desa, yang membentuk itu kepala desa bikin pengelola desa budaya. Kemudian di kabupaten juga ada kebetulan di kulon progo paling dulu kan ada dinas kebudayaan. Ya amat sangat sejalan, harmonislah hubungannya. Saya kira sekarang sudah menjadi satu kebersamaan setelah jogja betul betul sudah terlaksana yang berstatus istimewa, ini memang program umumnya untuk di kulon progo program umumnya ini adalah pembangunan yang berpihak pada rakyat dan berbasis budaya.”* (wawancara dengan Bapak Umar Sanusi selaku ketua desa budaya Hargomulyo, tanggal 23 Februari 2017)

Berdasarkan wawancara diatas hubungan antara pengurus desa budaya, aparatur desa dan dengan Dinas Kebudayaan cukup baik. Instansi- instansi ini dapat berjalan bersamaan karena adanya tujuan yang sama. Hal ini karena adanya program yang ada di Kulon progo yaitu pembangunan yang berpihak pada rakyat dan berbasiskan budaya. Hubungan yang baik ini juga ada di desa lainnya, salah satunya ada di desa

Tuksono. Pengurus desa budaya dengan pemerintah desa saling mendukung dalam pengembangan desa budaya Tuksono. hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ambardi ketua desa budaya Tuksono yaitu :

*“Untuk hubungan e yo baik sekali, disini untuk desa budaya tuksono itu dengan pemerintah desa itu berjalan bersama artinya saling mendukung, karena sebagian pengurus juga dari pamong desa, juga pak lurahnya juga orang senang kesenian jadi sangat bagus, bisa berjalan dengan baik, Kalau dari dinas kebudayaan kabupaten juga sering berkumpul, sering diundang kesana, dengan provinsi juga begitu kalau provinsikan langsung dibuat agenda, langsung diberi anggaran sekian.” (wawancara dengan Bapak Ambardi selaku ketua desa budaya Tuksono, tanggal 21 Februari 2017)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ambardi selaku ketua desa budaya Tuksono bahwa pengurus desa budaya dengan pemerintah desa saling mendukung dalam pengembangan desa budaya yang ada di Tuksono. Faktor dari hubungan ini adalah karena didalam kepengurusan desa budaya terdapat aparatur desa yang juga mendukung pengembangan desa budaya. Faktor kepala desa yang mendukung kegiatan kebudayaan dikarenakan kepala desa yang memang menyukai kegiatan kebudayaan terutama dalam bidang kesenian, menyebabkan hubungan pengurus desa budaya dan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik. Dalam hal kordinasi Dinas Kebudayaan juga mengundang pengurus desa budaya untuk mengadakan pertemuan terkait apa yang dibutuhkan pengurus desa budaya untuk pengembangan desa budaya di daerahnya.

Dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo Dinas Kebudayaan DIY mempunyai peran sebagai pembuat program dan kegiatan. Hubungan yang terjalin antar instansi dan pelaksana dari pengembangan desa budaya sudah cukup baik. Dalam perencanaan, pembuatan program maupun kegiatan-kegiatan seperti event besar dibuat oleh Dinas Kebudayaan DIY. Desa budaya hanya menjalankan program dari Dinas Kebudayaan. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Ngadi Sunaryo Ketua desa budaya Bugel yaitu :

“O kegiatan kegiatan niku kan sing event event itukan onten program dari dinas kebudayaan baik kabupaten maupun provinsi, yakita melaksanakan,”(wawancara dengan bapak Sunaryo Ketua desa budaya Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Ketergantungan terhadap Dinas ini menyebabkan desa budaya yang ada di Kulon Progo menjadi akan sulit berkembang. Karena desa budaya kurang memiliki inisiatif dalam pembuatan program dan kegiatan. dalam kegiatan terutama untuk kegiatan event yang cukup besar desa hanya menunggu instruksi dan perintah dari Dinas Kebudayaan. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Markus Suarisman Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY yaitu:

“sebetulnya kendala itu datang dari masyarakat sendiri ya, karena kita sebagai pengelola desa budaya itu berharap bahwa masyarakat desa budaya itu bisa mandiri dalam arit tidak ketergantungannya terhadap pemerintah.” (wawancara dengan bapak Markus Suarisman selaku Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, tanggal 13 Februari 2017)

Dalam hubungan antar kelompok budaya di desa budaya kadang-kadang masih terdapat konflik atau ketidakharmonisan, konflik ini terjadi antara kelompok kebudayaan dengan kelompok keagamaan. Konflik ini dapat menyebabkan terhambatnya pengembangan desa budaya, yang disebabkan oleh ketidakharmonisan antar kelompok masyarakat itu sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ngadi Sunaryo ketua desa budaya Bugel, yaitu :

“sekarang memang termasuk rentannya itu antara budaya dan agama itu kadang-kadang sering bertabrakan itu, itu dimana mana hampir sama itu, tetapi alhamdulillah asal kita itu kerjasama dan selalu kordinasi kalau disini ya tidak begitu mencolok” (wawancara dengan bapak Ngadi Sunaryo selaku ketua desa budaya Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi atau pandangan antara kelompok kebudayaan yang memegang teguh adat istiadat dari nenek moyang dengan kelompok agama tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Umar Sanusi ketua desa budaya Hargomulyo, yaitu:

*“Tapi ini masih perlu diwaspadai jadi bagaimana mensinergikan antara agama dengan kebudayaan, ini rawan sekali kalau tidak pandai pandai mengatur ya terjadi geseran geseran saya kira akan berakibat tidak baik. Jadi ini memang harus diatur rapi bijaksana sehingga tidak terjadi geseran-geseran. Hal ini memang seperti tadi saya katakan ada sholawatan, itukan dari kelompok agama terbesar dan dan bersama sama dibina kemudian di sisi lain harus saling menghormati juga saling saling menghargai keberadaan masing masing yang penting tidak samapi terjadi pertikaian perbedaan itu lumrah, tapi jangan sampai terjadi suatu pertikaian. Sebab antara pelaksanaan agama ini dengan mereka yang kaum mempertahankan adat ini pakai banyak simbol-simbol maunya*

*sebetulnya hanya kepada Yang Maha Kuasa tapi dia membuat simbol simbol yang kadang kadang dari kelompok agama ini musyrik dan sebagainya , ha ini pelan pelan dijaga. Bahkan saya sendiri itu sebetulnya masuk kesitu itu untuk mengantisipasi pergesekan persgesekan yang tidak perlu kebetulan saya bisa memperlemah, saya sendiri merasa bukan budayawan yang handal ya, tapi niatan saya untuk mengawal.” (wawancara dengan Bapak Umar Sanusi selaku ketua desa budaya Hargomulyo, tanggal 23 Februari 2017)*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Umar Sanusi selaku ketua desa budaya Hargomulyo bahwa dalam upacara-upacara yang dilakukan oleh kelompok kebudayaan dalam menjalankan adat dan tradisi dari yang diturunkan oleh nenek moyang dan sudah berjalan sejak dulu, sering kali menggunakan simbol-simbol atau perantara, seperti sesaji, ubo rampe atau makanan dan lainnya, yang sebenarnya ditujukan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Seperti kegiatan sedekah laut yang bertujuan sebagai perwujudan rasa syukur teradap Tuhan Yang Maha Esa dan menggunakan sesaji sebagai simbol rasa syukur yang kemudian dihanyutkan dilaut dan juga acara wiwitan dan tingkep tandur yang dalam pelaksanaannya menggunakan gunungan atau *ubo rampe* yang kemudian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hasil panen dapat melimpah. Hal ini mendapat tanggapan yang berbeda dari kelompok keagamaan yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok kebudayaan ini adalah hal musyrik atau syirik dengan menggunakan sesajen itu dianggap telah menyekutukan Allah.

Jadi, dapat diketahui dari data yang didapatkan dari wawancara diatas bahwa dalam hubungan antar organisasi ini peran dari Dinas Kebudayaan DIY adalah sebagai pembuat program dan kegiatan dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo, sedangkan untuk dinas kebudayaan Kulon Progo sendiri adalah sifatnya hanya sebagai kewilayahan. Desa budaya sendiri adalah sebagai pelaksana program atau kegiatan yang sudah dibuat Dinas Kebudayaan DIY. Dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo kordinasi melalui jalur langsung dari Dinas Kebudayaan DIY dengan desa budaya yang ada di Kulon Progo. Desa-desa budaya di Kulon Progo sendiri masih dalam tahap penguatan potensi budaya yang dimiliki oleh masing-masing desa budaya di Kulon Progo.

Dalam hubungan antar organisasi ini juga masih terdapat sebuah ketergantungan dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo ini, yaitu antara Dinas Kebudayaan DIY dengan desa budaya di Kabupaten Kulon Progo. Desa budaya masih bergantung kepada Dinas Kebudayaan DIY, baik dari segi program dan kegiatan maupun dalam anggaran dana untuk kegiatan kebudayaan yang akan dilaksanakan di desa budaya. Desa kurang memiliki inisiatif sendiri untuk pengembangan desa budayanya. Dalam hubungan antar kelompok di desa budaya sendiri masih terjadi beberapa konflik yaitu antara kelompok kebudayaand dengan kelompok agama atau religi. Konflik ini dikarenakan kesalahpahaman antara kedua kelompok ini.



### **3. Ketersediaan sumber daya ( *Resources for Program Impelementation* )**

Sebelum adanya dana keistimewaan pengembangan desa budaya menggunakan dana yang ada di desa masing-masing. Hal ini dikarenakan APBD yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang sangat kecil pada waktu sebelum adanya keistimewaan Yogyakarta. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta memiliki beberapa kewenangan khusus diantaranya adalah dalam hal kebudayaan. Keistimewaan lainnya yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta adalah adanya anggaran tersendiri atau anggaran khusus yang biasa disebut dengan dana keistimewaan. Sebagai salah satu bentuk untuk menopang keistimewaan Yogyakarta, salah satunya dalam bidang kebudayaan, pemerintah DIY mengalokasikan sebagian dana keistimewaan ini untuk pengembangan desa-desa budaya yang ada di seluruh DIY, termasuk di Kulon Progo.

Pada tahun 2016 Dinas kebudayaan DIY mengalokasikan anggaran untuk pengembangan desa budaya sebesar 3,5 miliar. Anggaran untuk pengembangan desa budaya di Kulon Progo mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, yaitu untuk tahun 2017 Dinas Kebudayaan menganggarkan sebesar 7,5 miliar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Markus Suarisman, Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY yaitu :

“Kita menggunakan dana keistimewaan. Untuk alokasinya desa budaya presentasinya yang jelas untuk pengembangan desa budaya tahun ini menghabiskan sekitar 7,5 miliar, untuk tahun 2016 sekitar 3,5 miliar” (wawancara dengan Bapak Markus Suarisman, selaku

Kasie Adat dan Tradisi dinas kebudayaan DIY, tanggal 13 Februari 2017)

Anggaran dari Dinas Kebudayaan ini diberikan ke desa-desa budaya yang ada di Kulon Progo untuk menunjang kegiatan yang ada di desa budaya. Salah satunya seperti yang ada di desa budaya Bugel, yang dimana desa budaya Bugel mendapatkan sejumlah bantuan dana untuk penyelenggaraan kegiatan adat istitadat yang dilaksanakan di desa tersebut. Dana ini diberikan oleh Dinas Kebudayaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Ngadi Sunaryo ketua desa budaya Bugel, yaitu :

*“Ya kami sudah mengajukan tapi yang berwujud dana itu hanya, seperti kemarin sedekah laut kami megajukan ke dinas itu juga mendapat bantuan dari sana dari DIY itu mandapat 10 juta, terus upacara yang daruno daruni karena dalam tahun yang sama kalau dari provinsi dua kali gak bisa akhirnya dari kabupaten mendapat 4,5 juta, jadi dana yang untuk kegiatan.”* (wawancara dengan Bapak Ngadi Sunaryo selaku Ketua Desa Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Bantuan dari dinas kebudayaan DIY ini juga berupa fasilitas atau alat-alat latihan untuk menunjang pengembangan desa budaya. Desa-desa budaya yang ada di Kulon Progo ini juga mendapat bantuan berupa alat-alat musik, gamelan maupun kostum atau pakaian untuk kegiatan kebudayaan yang ada di desanya masing-masing. Meskipun bantuan yang diberikan tidak bisa dimiliki oleh desa budaya secara sepenuhnya atau titipan dari Dinas Kebudayaan karena adanya aturan baru yang tidak

adanya program hibah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Umar Sanusi ketua desa budaya Hargomulyo, yaitu :

*“Penyelenggaraan gelar potensi, mengikuti event, dan tempo hari mendapatkan istilahnya titipan karena aturan sudah tidak ada hibah, wujudnya luar biasa itu, dan kami terpacu menyesuaikan dengan yang batuan yang diberikan pakaian kethoprak, pakaian jathilan, krumpyung, campursari, hadroh, ya sekitar harga 200jtanlah, orgen, drum dari provinsi.” (wawancara dengan bapak Umar Sanusi selaku ketua desa budaya Hargomulyo tanggal 23 Februari 2017)*

Sumber dana lainnya dalam pengembangan desa budaya adalah berasal dari anggaran pemerintah desa atau APBdes. Dana dari desa ini digunakan untuk menopang berbagai kegiatan yang ada, baik latihan rutin, kegiatan adat istiadat, maupun event budaya yang diselenggarakan oleh desa. Penggunaan dana dari APBdes ini sudah berlangsung cukup lama, karena sebelum belum adanya dana keistimewaan dari pemerintah DIY, dan anggaran dari dinas di Kabupaten atau dari APBD Kulon Progo yang sangat kecil sehingga sulit untuk menopang atau menunjang kegiatan kebudayaan yang ada di desa budaya di Kulon Progo. Salah satu contohnya adalah di desa budaya Bugel, dalam menunjang dan mengembangkan kebudayaan yang ada di desa Bugel pemerintah desa mengalokasikan sebagian APBdesnya untuk sejumlah kegiatan kebudayaan yang ada di desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wuryanto, kasie Kemasyarakatan desa Bugel yaitu :

*“Kalau sumber dananya kita dari APBdes sudah tiga tahun ini kita anggarkan dari apbdes, meskipun ketika ada permintaan tampilan dari dinas terkait itu sudah ada sumber dana, cuman kadang kita*

*kasih dana pendamping, tapi dana pendamping itu kita anggarkan untuk satu tahun kegiatan, ketika ada kegiatan yang sifatnya undangan atau instruksi dari pemerintah juga kegiatan yang sifatnya inisiatif lokal dari masing masing pelaku seni, misal di pedukuhan ingin mengadakan apa kita bisa ambilkan dari anggaran di desa itu termasuk kita juga menganggarkan bantuan berupa alat kesenian di masing masing pedukuhan sesuai potensi yang dimiliki pedukuhan masing masing, jadi nominalnya kita yang seragamkan tapi wujud bantuannya yang berbeda beda.”* (wawancara dengan Bapak Wuryanto selaku Kasie Kemasyarakatan desa Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Wuryanto diatas, bahwa pemerintah desa Bugel memberikan dukungan yang cukup baik dalam pengembangan dan kegiatan desa budaya Bugel. Bentuk dukungan ini adalah dengan memberikan anggaran khusus yang ada dalam Apbdes desa Bugel. Untuk kegiatan budaya yang sudah mendapatkan anggaran dari Dinas Kebudayaan, pemerintah desa masih tetap menganggarkan anggaran tambahan untuk kegiatan yang dianggarkan untuk satu tahun kegiatan. Pemerintah desa juga memberikan bantuan anggaran untuk kegiatan kebudayaan yang merupakan inisiatif dari masyarakat desa. Pemerintah desa Bugel juga memberikan bantuan berupa peralatan atau perlengkapan untuk menunjang kegiatan kebudayaan yang ada di setiap pedukuhan yang ada di desa dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh setiap pedukuhan yang ada di desa budaya Bugel. Dengan pemberian anggaran dari pemerintah DIY melalui dana keistimewaan dan juga APBdes yang dianggarkan oleh desa ini menjadi faktor pendukung yang cukup penting, karena untuk pengembangan desa budaya terutama

untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang ada memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit.

Selain dari dana pemerintah DIY dan Apbdes, dalam menjalankan kegiatan yang ada di desa budaya di Kulon Progo juga menggunakan anggaran swadaya dari masyarakat desa. Anggaran swadaya masyarakat desa ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutinitas, seperti latihan rutin kesenian yang ada di desa, kemudian untuk kegiatan tradisi merti desa atau merti dusun yang dilaksanakan di desa budaya. Hal ini seperti dikatakan oleh Bapak Umar Sanusi ketua desa budaya Hargomulyo, yaitu:

*“Sumber dananya ya kebanyakan ya swadaya, kalau event event tertentu memang mendapatkan dana dari danais, jadi untuk gelar potensi setahun sekali kemudian ada semacam upgrade, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang semacam rutinitas ya dianu anggota kelompok sendiri. Kegiatan yang rutin itu di dusun masing masing itu merti dusun selain itu juga kita anggarkan melalui dana desa untuk pentas maupun bantuan perawatan peralatan-peralatan gamelan disini juga ada gamelan desa. “ (wawancara dengan Bapak Umar Sanusi selaku ketua desa budaya Hargomulyo, tanggal 23 Februari 2017)*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Juwari selaku kasie Kemasyarakatan desa Tuksono, bahwa untuk menjalankan kegiatan latihan rutin yang dilaksanakan di sanggar yang ada di desa menggunakan dana swadaya dari masyarakat. Anggaran untuk kegiatan latihan rutin juga diambilkan dari sisa dana yang diberikan oleh Dinas. Karena dana keistimewaan atau dana dari Dinas Kebudayaan hanya diberikan ketika

desa budaya mengikuti kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan. Pemerintah desa sendiri juga sudah menyisihkan anggaran untuk kegiatan pelatihan kesenian maupun kegiatan kebudayaan lainnya. Penggunaan anggaran swadaya ini dikarenakan belum adanya anggaran tersendiri yang di gunakan untuk kegiatan pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada di desa budaya.

Peran pemerintah desa sendiri cukup penting untuk pengembangan desa budaya yang ada di daerahnya. Pemerintah desa bisa memberikan dukungan baik secara moral maupun secara materi. Pemerintah desa dapat memberikan anggaran dari APBdes maupun perlengkapannya alat atau pakaian untuk mendukung kegiatan kebudayaan yang ada di daerahnya. Jika pemerintah desa sendiri kurang mendukung kegiatan kebudayaan yang ada di daerahnya, maka akan menyebabkan pengembangan desa budaya di daerahnya menjadi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan desa budaya hanya akan mengandalkan dana dari Dinas Kebudayaan. Sementara Dinas Kebudayaan sendiri hanya akan memberikan bantuan anggaran untuk kegiatan event kebudayaan saja dan jumlahnya juga terbatas. Sementara untuk kegiatan rutin di desa, Dinas Kebudayaan belum bisa memberikan anggaran tersendiri untuk kegiatan rutin tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Purnomo ketua desa budaya Tuksono yaitu:

*“Jadi tanjungharjo sini itu desapun belum bisa menganggarkan untuk kegiatan desa budaya jadi setiap event itu cuman njagakke dana dari dinas, kalau pemdes bisa menganggarkan nantikan kegiatan bisa lebih maju, lebih-lebih nanti bisa*

*bekerjasama dengan pihak ketiga lebih maju lagi. cuman anggaran karena desa budaya tanjungaharjo itu setiap ada event anggarannya hanya anggaran dari dinas baik itu dinas kebudayaan DIY maupun dinas kebudayaan kabupaten. Jadi kalau kita mau memprogramkan yang muluk muluk yang banyak itu tidak berani karena nanti jangan jangan kita nanti hanya memuat program tapi tidak bisa tereliasasikan mubazir karena terpancang anggaran. Kalau pemdes bisa menganggarkan otomatis kita sudah bisa untk merencanakan kegaitan ini pada bulan ini itu bisa, tapi berhubung pemdes tidak bisa menganggarkan desa budaya kita programnya sederhana dulu, kira kira yang nanti bisa berjalan dan membutuhkan biaya yang kecil dan ringan.” (wawancara dengan Bapak Purnomo selaku ketua desa budaya Tanjungharjo, tanggal 24 Februari 2016)*

Kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan desa budaya yang ada di Kulon Progo. Hal ini dapat mengakibatkan kegiatan yang dijalankan di desa budaya menjadi kurang maksimal. Pergantian kepala pemerintahan yang terjadi di desa juga menjadi faktor penting dalam pengembangan desa budaya. Kepala desa yang mendukung kegiatan budaya akan memberikan dukungan salah berntukanya adalah dengan memberikan anggaran khusus untuk kegiatan kebudayaan yang ada desanya. Namun sebaliknya jika kepala desa sendiri tidak mau mendukung kegiatan desa budaya itu sendiri maka kegiatan kebudayaan sebelumnya sudah ada sebeumnya menjadi tidak berjalan lagi. Anggaran dari desa untuk kegiatan desa budaya pun juga menjadi sedikit karena kurang diperhatikan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sujimah, Kepala Urusan Umum desa Tanjungharjo, yaitu:

*“Dari pemerintah desa kalau dulu pengembangannya diperhatikan tetapi begitu ganti-ganti kepala desa itu untuk sekarang perhatiannya, misalnya berkaitan dengan anggaran agak tidak ada perhatian, tidak diefektifkan kecuali dari dinas, itu kecamatan memperhatikan sekali tetapi kalau pemerintah desa sendiri karena kebijakannya sendiri sendiri ya sendiri sendiri pendapatnya. Kalau memang anggaran-anggaran apbdes sangat kecil sekali memperhatikannya. Jadi kalau ada apa-apa itu juga berusahanya pengurus desa budaya misalnya mau gerakke ini gerakki ini yo alhamdulillah ada pendamping itu yo alhamdulillah tapi masalah biaya itu nanti swadaya. Dananya tergantung dari nanti mencarinya pengurus itu bisa atau tidak tapi kalau misalnya pengembangan kreatifitas atau pelatihan misalnya gejug lesung mau di pakai dimana, dipentaskan dimana nanti warga masyarakat dan pengurusnya yang harus kreatif dan aktif.”*  
(wawancara dengan Ibu Sujimah Kepala Urusan Umum desa Tanjungharjo, tanggal 22 Februari 2017)

APBdes yang dialokasikan untuk kegiatan kebudayaan di desa budaya Tanjungharjo sangat kecil, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari kepala desa untuk kegiatan kebudayaan. Pengelola desa harus mencari anggaran dari sumber lainnya, seperti mengambil anggaran dari Kecamatan. Dalam penyelenggaraan kegiatan kesenian, yaitu dalam pementasan wayang kulit pengelola desa budaya meminta bantuan anggaran dari Dinas Sosial DIY. Dalam kegiatan kebudayaan yang ada desa juga dibantu dengan anggaran swadaya dari masyarakat desa itu sendiri. Anggaran swadaya ini terutama digunakan untuk kegiatan kebudayaan rutin yang ada didesa budaya, seperti latihan rutin kegiatan kesenian maupun adat dan tradisi di setiap dusun yang ada di desa. Latihan rutin yang dilaksanakan di desapun menjadi kurang maksimal, misalnya



seperti latihan karawitan yang seharusnya dilaksanakan 5 kali dalam seminggu hanya bisa dilaksanakan 2 kali dalam seminggu.

Jadi, dapat diketahui dari data yang didapatkan dari wawancara diatas bahwa ketersediaan sumber daya dalam hal ini sumber dana utama dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo ini berasal dari Dana Keistimewaan atau danais. Sumber anggaran lainnya berasal dari Apbdes dan juga swadaya dari desa budaya sendiri. Ketersediaan anggaran yang ada juga masih kurang untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di desa-desa budaya di Kulon Progo. Hal ini disebabkan anggaran yang diberikan dari Dinas Kebudayaan DIY terbatas. Di kabupaten Kulon Progo juga terdapat pemerintah desa atau kepala desa yang kurang mendukung dengan kegiatan kebudayaan yang ada di desanya, sehingga dalam APBdes tidak terdapat anggaran untuk pengembangan desa budaya.

#### **4. Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana (*Characteristics Of Implementing Agencies*)**

Karakteristik organisasi internal dan kemampuan dari agen pelaksana juga menentukan pelaksanaan program. Di dalamnya termasuk kemampuan teknis, manajerial, mengawasi dan mengintegrasikan keputusan dari sub unitnya, serta kekuatan dukungan politik dari pimpinan politik nasional, administratif, diorganisasi lainnya, serta kelompok terkait. Untuk mendukung pengembangan desa budaya di Kulon Progo pemerintah DIY melalui Dinas Kebudayaan mempunyai program pendamping desa budaya. Setiap desa budaya yang ada di Kulon Progo diberikan 2 orang tenaga pendamping. Tenaga pendamping ini mempunyai

tugas untuk membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki oleh desa budaya yang didampinginya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Markus Suarisman Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, yaitu :

*“Untuk tahun ini adalah penguatan desa budaya. Jadi untuk di Kulon Progo itu ada 15 desa budaya yang didampingi oleh tenaga ahli seni budaya di masyarakat itu sebanyak 30 orang, masing-masing desa itu ada 2 personil yang mendampingi, dimana tenaga pendamping itu akan membantu pemerintah desa itu untuk memajukan dan mengembangkan seni budaya ,agar bisa dikembangkan dan lebih diratakan di desa. Dan untuk pendamping juga sudah dibekali tentang apa kriteria desa budaya dan apa yang harus dilakukan sudah pembekaln sudah, jadi perhatian pemerintah DIY terhadap desa budaya itu menyediakan tenaga pendamping seni budaya di masyarakat untuk membantu masyarakat di desa budaya” (wawancara dengan Bapak Markus Suarisman selaku Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, tanggal 13 Februari 2017)*

Untuk menjadi pendamping budaya mempunyai beberapa kriteria, salah satu hal dasar yang harus dimiliki adalah memiliki kemampuan dalam bidang kesenian dan pengetahuan tentang kebudayaan di masyarakat. Kemampuan seni ini seperti kemampuan untuk memainkan alat musik tradisional maupun alat gamelan. Dengan memiliki kemampuan seni dan budaya yang mumpuni ini diharapkan pendamping budaya dapat mampu mengembangkan dan mengajarkan keahliannya di masyarakat, sehingga kemampuan dibidang seni dan budaya menjadi meningkat. Pendamping budaya juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, hal ini dikarenakan agar pendamping budaya dapat dengan mudah

berinteraksi dan berkordinasi dengan masyarakat terkait pengembangan desa budaya di daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Markus Suarisman, Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, yaitu :

*“kriteria pendamping itu yang jelas harus minimal ngerti seni budaya di masyarakat, pandai memotivasi orang dan bisa sebagai fasilitator ini harus bisa memberikan solusi untuk pemecahan di daerah, pendamping minimal harus memiliki kemampuan satu bidang seni budaya, misalnya pengrawit, seni rupa, desain komunikasi, pemusik, itu minimal satu basic yang bisa dikembangkan di masyarakat. Pada dasarnya harus punya basic seni, kalau tidak bisa nanti kita kesulitan untuk bisa mengapresiasi masyarakat di bidang seni. Untuk tahun ini minimal SMA namun yang terjaring mayoritas S1, ada juga yang S2 dibidang seni budaya, jadi kualitasnya lebih baik.”* (wawancara dengan bapak Bapak Markus Suarisman selaku Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, tanggal 13 Februari 2017)

Peran penting dari pendamping budaya ini adalah sebagai penghubung dan yang menjembatani antara desa budaya atau masyarakat dengan pemerintah. Pendamping budaya ini juga akan menyampaikan apa saja yang dibutuhkan dan kegiatan yang diinginkan oleh desa budaya ke Dinas Kebudayaan. Pendamping budaya ini juga sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kebudayaan yang ditempatkan di desa-desa budaya di Kulon Progo. Sehingga informasi tentang program dan kegiatan dari Dinas Kebudayaan juga dapat tersampaikan ke desa-desa budaya yang ada di Kulon Progo. hal ini juga untuk menjaga hubungan antara pemerintah dengan desa budaya dan juga masyarakat desa dapat terjalin dengan baik.

Salah satu fungsi dari pendamping budaya ini adalah melihat apa saja potensi dari desa didampinginya dan juga kebutuhan apa saja yang

diperlukan untuk menunjang atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa budaya ke Dinas Kebudayaan, yang nantinya akan ada tindak lanjut dari Dinas Kebudayaan DIY. Contohnya adalah ketika desa yang didampinginya membutuhkan dana atau mengajukan proposal permintaan dana untuk kegiatan budaya yang ada di desanya, maka pendamping dapat menjadi perantara antara desa budaya dengan Dinas Kebudayaan DIY. Pendamping budaya juga sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi atau kemampuan dari masyarakat desa budaya seperti memberikan pelatihan kesenian atau membuat kreasi seni. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Ngadi Sunaryo ketua desa budaya Bugel, yaitu:

*“Pendamping itu ya mengarahkan dari kebudayaan, kebudayaan yang ada disini potensinya ini, apa yang dimiliki mereka itu seharusnya menjembatani dengan program program yang ada di kabupaten maupun provinsi yang kaitannya dengan kebudayaan, ketika di kabupaten itu ada kegiatan apa program maka disini bisa mengikuti, kalau mungkin butuh dana sini bisa mengajukan, atau membutuhkan pendidik kesenian, juga memfasilitasi secara tidak resmi ketika ada pelaku pelaku seni, kita butuh latihan apa, termasuk mengarahkan potensi budaya yang ada disini, barangkali kalau seni budaya itu masih kecenderungannya masih alami kadang kadang ada kalanya diarahkan yang sifatnya pertunjukan atau kreasi, itu pendamping yang bisa menjemputani.”*  
(wawancara dengan Bapak Ngadi Sunaryo selaku ketua desa budaya Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Pendamping budaya juga akan menginformasikan tentang program dan kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan kepada Desa Budaya yang didampinginya, sehingga nantinya desa budaya tersebut dapat mengikuti berbagai kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan.

Pendamping budaya ini juga akan membantu setiap proses untuk mengikuti kegiatan yang akan diikuti oleh desa budaya yang didampinginya. Seperti mulai dari proses pendaftaran, persiapan, dan saat desa budaya mengikuti kegiatan. Pendamping budaya ini juga mempunyai peran penting untuk menggerakkan masyarakat dalam mengikuti event event yang diselenggarakan.

Program pendamping budaya ini sangat mempunyai peran yang cukup penting dalam pengembangan desa budaya yang ada di Kulon Progo, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Meskipun Dinas Kebudayaan mensyaratkan harus memiliki kemampuan dibidang kesenian, tetapi tidak semua kemampuan seni budaya yang dimiliki oleh pendamping budaya bisa diterapkan di desa budaya yang ada di Kulon Progo. hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ngadi Sunaryo ketua desa budaya Bugel, yaitu :

*“Pendamping budaya sudah tahun yang ketiga, kita desa bugel mendapat SK budaya baru kemarin senin, pendamping sangat dibutuhkan karena pendamping mempunyai keahlian tertentu, seperti tahun pertama itu ada mbak wuri dan mbak rusdy, mbak wuri dari jurusan musik, mas rusdy itu dari kesenian tapi karena mas rusdy itu dari kalimantan jadi kurang pas kalau di sini”* (wawancara dengan Bapak Ngadi Sunaryo selaku ketua desa budaya Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Berdasarkan wawancara diatas kita dapat melihat bahwa meskipun pendamping budaya ini mempunyai keahlian atau kemampuan dasar dibidang kesenian yang cukup baik tetapi jika tidak sesuai dengan daerah

yang didampinginya maka tidak akan bisa diterapkan. Keahlian yang dimiliki oleh pendamping budaya ini harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya yang ada di desa budaya yang ada di Kulon Progo yang memiliki budaya Jawa yang kental. Jika Dinas Kebudayaan dalam merekrut pendamping budaya ini tidak melihat dari hal ini maka keahlian yang dimiliki oleh pendamping ini tidak bisa diterapkan dan diambil manfaatnya oleh masyarakat.

Kemampuan yang dimiliki oleh pendamping budaya yang ada di Kulon Progo masih terbatas pada satu bidang tertentu saja. Pendamping budaya hanya terfokus pada bidang kesenian. Sehingga pengembangan yang ada di desa budaya di Kulon Progo hanya terfokus pada bidang kesenian, padahal masih terdapat bidang kebudayaan lain yang dimiliki Kulon Progo seperti kuliner dan kerajinan. Contoh dalam pengembangan dibidang kerajinan adalah seperti memberikan inovasi pada potensi kerajinan yang ada di desa budaya agar sesuai dengan minat pasar yang ada. Permasalahan lainnya dalam program pendamping budaya ini adalah kurangnya transparansi oleh Dinas Kebudayaan DIY ke desa budaya yang akan diberikan pendamping budaya. Salah satu contohnya adalah dalam hal perekrutan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ngadi Sunaryo ketua desa Bugel yaitu:

“Kalau perekrutan itu dari dinas provinsi DIY, desa hanya permohonanlah yang menentukan adalah di DIY. tidak tahu prosesnya jadi langsung daerah ini mendapatkan ini.” (wawancara dengan Bapak Ngadi Sunaryo selaku ketua desa budaya Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Juwari kasie Kemasyarakatan desa Tuksono, bahwa pengelola desa budaya tidak mengetahui syarat-syarat dari pendamping desa budaya ini. Semua sudah ditentukan oleh Dinas Kebudayaan DIY, sehingga desa hanya tinggal menerima saja. Desa budaya juga kurang dilibatkan dalam penentuan pendamping budaya yang akan di tempatkan di desa desa budaya yang ada di Kulon Progo. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Wuryadi kasie Kemasyarakatan desa Bugel, yaitu:

*“Cuma untuk yang kebijakan biasanya serapannya lewat workshop yang mereka gelar itukan pelaku seni akan diundang dan nanti disitulah selain untuk meningkatkan kapasitas pelaku seni, disitu juga ada timbal balik dari pelaku seni, misal dinas kalau buat acara jangan terfokus di kabupaten saja, jadikan di tiik, mbok salah satu yang menentukan untuk pendamping itu dari desa sendiri.”* (wawancara dengan Bapak Wuryadi selaku Kasie Kemasyarakatan desa Bugel, tanggal 8 Februari 2017)

Dalam pengembangan desa budaya Dinas Kebudayaan DIY juga membentuk pengelola desa budaya untuk pelaksanaan kegiatan. Pengelola desa budaya ini bertugas untuk mengurus dan mengembangkan semua potensi kebudayaan yang ada di desa budaya. Pengelola desa budaya ini terdiri dari berbagai unsur yang terdapat dalam masyarakat. Seperti dari tokoh masyarakat, aparatur desa, tokoh agama, seniman di masyarakat dan juga masyarakat desa budaya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Markus Suarisman Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, yaitu:

*“Dan untuk pendamping juga sudah dibekali tentang apa kriteria desa budaya dan apa yang harus dilakukan sudah pembekaln sudah, jadi perhatian pemerintah DIY terhadap desa budaya itu menyediakan tenaga pendamping seni budaya di masyarakat untk membantu masyaarakat di desa budaya, dan juga di desa budaya ada yang namanya pengurus, pengelola desa budaya. Dimana personilnya itu terduiri dari unsur-unsur masyarakat, ulama , perangkat desa, tokoh masyaarakat seni budaya, maupun tokoh-tokoh masyaraktat di bidang yang lain. Jadi mereka berkumpul menjadi satu kesatuan untk bisa memajukan desa tersebut. Jadi pengelola desa budaya itu dikondikan harus memiliki ad art dan ada SK legalistas dari kepala desa.” (wawancara dengan Bapak Markus Suarisman selaku Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, tanggal 13 Februari 2017)*

Pada Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana ini Dinas Kebudayaan DIY menerjunkan para pendamping budaya untuk desa-desa budaya yang ada di Kulon Progo. Para pendamping ini harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya menguasai dibidang kesenian contohnya seni tari atau alat musik tradisional. Pendamping budaya ini juga diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum diterjunkan di desa-desa budaya. Tugas dari pendamping budaya ini adalah untuk membantu menggali dan mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki oleh desa-desa budaya yang di dampunginya. Pendamping budaya ini juga sebagai kepanjangan dari Dinas Kebudayaan DIY untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Di desa budaya sendiri juga terdapat pengelola desa budaya, yang mempunyai tugas untuk mengelola berbagai kegiatan kebudayaan yang ada di desa bduaya, baik dari adat dan tradisi, maupun kesenian-kesenian yang ada.



Dalam pengembangan desa budaya ini masih terdapat kepala desa yang kurang mendukung dengan kegiatan kebudayaan yang ada di desanya. Kurangnya dukungan dari kepala desa ini menyebabkan kegiatan-kegiatan yang ada di kebudayaan menjadi terhambat. Dampak dari kurangnya dari dukungan kepala daerah. Kurangnya dukungan kepala desa ini mengakibatkan pemerintah desa tidak menganggarkan untuk kegiatan kebudayaan di desanya. Hal ini membuat program dan kegiatan kebudayaan yang akan dilaksanakan menjadi terkendala, seperti kegiatan latihan rutin kesenian karawitan yang seharusnya dilaksanakan tiga kali dalam seminggu menjadi hanya sekali dalam seminggu.

#### **B. Penerapan 3 Pilar Good Governance Dalam Pengembangan Desa Budaya Di Kulon Progo**

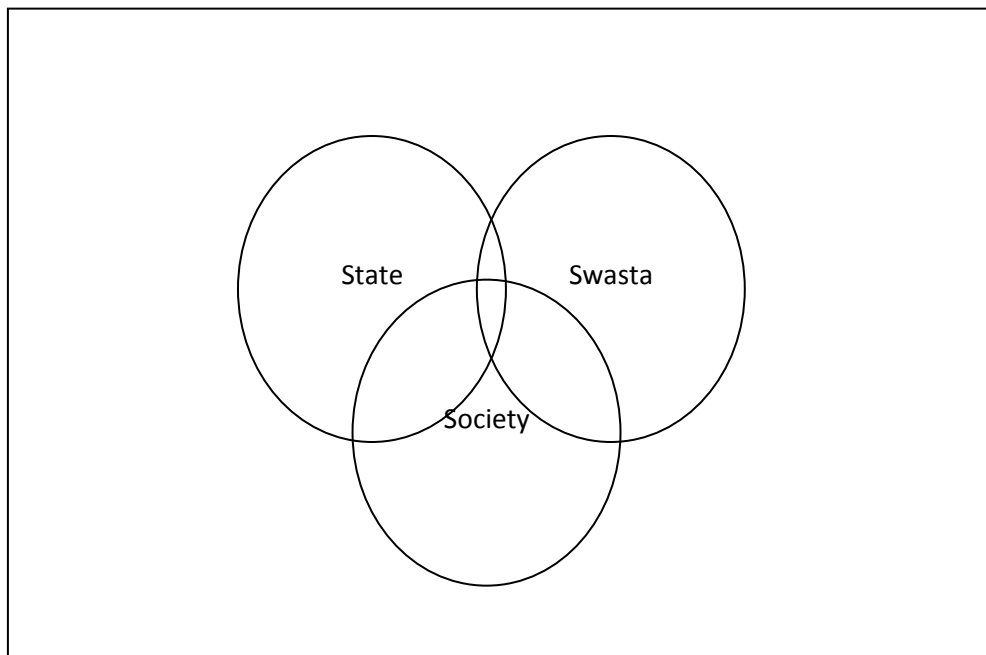
Menurut UNDP, istilah *governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integritas, serta untuk kesejahteraan rakyatnya. Sementara definisi *good governance* menurut World Bank ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran, terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Mardiasmo, 2002:23 dalam Ambar Teguh Sulistiyani, editor .2011 : 22-23)

Terdapat 3 pilar dalam *good governance*, yang pertama sektor *public governance* yaitu lembaga pemerintah, yang kedua *coporate governance* yang merujuk pada pihak swasta/dunia usaha, dan yang terakhir adalah *civil society* (masyarakat sipil). Untuk mewujudkan *good governance*, upaya pembenahan pada salah satu pilar harus dibarengi dengan pembenahan pada berbagai pilar lainnya secara serentak dan seimbang.

Ketiga aspek ini harus saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Berikut ini adalah gambar hubungan antar sektor :

**Gambar 3.1**

**Hubungan antara sektor state, swasta dan society**



Sumber : Sendarmayanti,2012. *Good Governance, Pemerintahan Yang Baik, Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*

*Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain yaitu negara sektor swasta dan masyarakat (*society*). Oleh karena itu *good governance* meliputi sistem administrasi negara. Maka upaya untuk mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya untuk melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

Jika dilihat dari ketiga aspek dalam *good governance*, sektor *state* menjadi aspek yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan *good governance*. Karena *state* mempunyai fungsi pengaturan dan juga yang memfasilitasi sektor dunia usaha atau swasta dan masyarakat. Sektor *state* ini juga memiliki fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan yang melekat pada sektor ini. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya perwujudan ke arah *good governance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud *good governance*.

Dalam konteks *good governance*, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator atau katalisator sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada semua komponen negara, meliputi dunia usaha dan masyarakat.

Dalam hal ini sektor pemerintah diwakili oleh Dinas Kebudayaan DIY. Dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo Dinas Kebudayaan DIY memiliki peran fasilitator dan mobilisator. Sedangkan untuk Dinas Kebudayaan yang ada di tingkat kabupaten hanyalah sebagai kewilayahan dan untuk pengembangan desa budaya diprogramkan ditingkat provinsi. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY dalam hal pengembangan desa budaya di Kulon Progo, salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan ini adalah dengan kegiatan gelar potensi desa budaya. Kegiatan ini ditujukan untuk melihat potensi dan juga perkembangan dari desa-desa budaya yang ada di Kulon Progo.

Dalam pengembangan desa budaya ini Dinas Kebudayaan DIY juga memiliki program pendampingan desa budaya. Desa-desa budaya yang ada di DIY akan diberikan 2 orang tenaga pendamping budaya. Para pendamping ini nantinya akan mempunyai tugas untuk membantu desa budaya untuk melestarikan dan mengembangkan potensi-potensi budaya yang ada di desa budaya yang didampungnya. Pendamping budaya ini juga sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kebudayaan dan sebagai penghubung antara Dinas Kebudayaan dengan masyarakat. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas Kebudayaan DIY dapat diketahui oleh desa-desa budaya dan nantinya desa-desa budaya ini dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Di desa budaya sendiri terdapat pengurus desa budaya yang dibentuk melalui SK kepala desa. Struktur dari pengurus desa budaya ini beranggotakan dari berbagai unsur yang ada dimasyarakat di desa budaya, seperti tokoh

agama, aparaturn pemerintah desa, seniman, hingga masyarakat umum. Pengelola desa budaya ini sebagai wadah untuk menampung berbagai kebutuhan dan keinginan yang dibutuhkan oleh desa budaya, kemudian akan disampaikan ke Dinas Kebudayaan DIY. Pengurus desa budaya ini juga merencanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang akan dilaksanakan di desa budaya seseuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh desa budaya.

Dalam kondisi lingkungan dalam pengembangan desa budaya ini, Desa budaya sendiri adalah sebagai pelaksana program dan kegiatan yang sudah ada di Dinas Kebudayaan. Salah satunya adalah seperti kegiatan event gelar potensi desa budaya. Desa budaya tinggal menyiapkan apa saja yang akan ditampilkan dalam kegiatan tersebut, seperti menyiapkan pertunjukan apa saja yang akan ditampilkan dan kebutuhan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Antusias dari masyarakat sendiri cukup tinggi dalam setiap melaksanakan kegiatan budaya yang ada di desa budaya. Dalam melaksanakan kegiatan setiap kelompok yang ada di desa akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan di desa budaya tersebut. Beberapa kelompok kesenian di desa ikut berpartisipasi dengan ikut menampilkan kesenian-kesenian daerahnya. Dalam upacara adat yang digelar di desa masyarakat antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan upacara adat tersebut. Masyarakat desa melakukan gotong royong dalam setiap pelaksanaan upacara adat yang dilaksanakan di desanya. Masyarakat mendukung upacara adat ini secara materiil maupun non-materiil. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Purnomo Ketua desa budaya Tanjungharjo, yaitu :

*“Untuk keterlibatan masyarakat antusias masih tinggi, setiap ada event itu pasti dukungannya pasti besar, dukungan pemikiran dukungan material. Katanlah setiap ada event dari organisasi-organisasi itu mau mengeluarkan swadaya untuk meramaikan event itu. Yang jelas setiap lebaran entah lebaran ke 3,4,5 sampai satu minggu itu setiap pedukuhan itu pasti ada kesenian yang dikeluarkan dari pedukuhan masing-masing yang pentasnya dipedukuhan masing-masing yang tujuannya untuk menghibur masyarakat. Itu tanpa dikomandoi dari siapaun, karena sudah merupakan kegiatan rutin dari organisasi itu, misalnya dari pedukuhan saya setiap lebaran ke 5 pentas jathilan itu mesti, kalau ini itu ada 8 pedukuhan tapi grup jathilan itu ada 10, jadi satu pedukuhan itu ada 2 grup jathilan.”* (wawancara dengan Bapak purnomo selaku ketua desa budaya Tanjungharjo, tanggal 24 Februari 2017)

Dalam pengembangan desa budaya ini hubungan yang terjalin masih antara pemerintah dan juga desa budaya saja, sedangkan untuk keterlibatan atau peran dari sektor swasta dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo masih sangat kurang. Sehingga hubungan antara ketiga sektor ini tidak berjalan dengan baik karena kurangnya keterlibatan dari sektor swasta. Dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo masih terjadi dua arah yaitu antara pemerintah dengan masyarakat desa budaya. Dinas Kebudayaan DIY belum bekerjasama dalam pengembangan desa budaya yang ada di Kulon Progo. Kerjasama yang dilakukan masih antara instansi pemerintah yaitu antara Dinas Kebudayaan DIY dengan Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Markus Suarisman Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, yaitu:

*“Kalau bekerja sama dengan pihak swasta itu kita belum, Cuma karena desa budaya itu adanya di wilayah kabupaten kita kerjasamanya dengan kabupaten, di tingkat daerah kita tidak punya wilayah basiknya di kabupaten, yang punya masyarakat kabupaten, yang punya lahan juga*

*kabupaten, kita hanya punya teritorinya saja, hak penuh di kabupaten, kita hanya sebagai fasilitator, mobilisator, motivator.”* (wawancara dengan Bapak Markus Suarisman selaku Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY, tanggal 13 Februari 2017)

Untuk keterlibatan swasta dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo ini hanya baru sekedar wacana. Rencananya kerjasama yang akan dilakukan antara desa budaya dengan pihak travel wisata. Pihak travel ini nantinya akan mengajak wisatawan atau turis untuk datang dan melihat berbagai macam kegiatan kebudayaan yang ada di desa-desa budaya. Contohnya adalah wisatawan bisa diajak untuk belajar kebudayaan yang ada di desa budaya seperti kesenian karawitan, atau menyaksikan upacara adat yang diselenggarakan di desa budaya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ambardi ketua desa budaya Tuksono, yaitu :

*“Belum bekerja sama dengan swasta. Itu baru rencana, baru bentuk baru wacana, itu di sentolo sering ada turis yang diajak sepeda onthel keliling, nanti yang menyewakan daerah sentolo itu udah ada wacana kalau bisa dibawa kesini,itu nanti di sungai progo itu kita main perahu. Riko ono bocah udah hubungan dengan hotel hotel, kalau ada turis bawa situ, sepeda onthel keliling desa desa, tapi yang sampai sini belum ada.”* (wawancara dengan bapak Ambardi” (wawancara dengan Bapak Ambardi selaku ketua desa budaya Tuksono, tanggal 21 Februari 2017)

Faktor lainnya yang menyebabkan kurangnya keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan desa budaya adalah pengembangan desa budaya masih fokus pada tahap pelestarian dan penguatan kebudayaan di desa budaya agar tetap terjaga. Kebudayaan yang ada di desa budaya di Kulon Progo belum di komersilkan secara luas, sehingga belum bisa melibatkan pihak swasta dalam pengembangannya. Desa budaya yang ada juga belum memiliki SDM yang

mumpuni untuk mengelola desa budaya sebagai tempat tujuan wisata. Hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Wuryanto kasie kemasyarakatan desa Bugel, yaitu :

*“Belum ada, seni budayanya belum digeser belum diarahkan ke pariwisata dan komersil kita belum mengarah kesitu. Durung di dol dan belum payu didol. Kalau untuk dijual harus kreatif, tapi masalah kesiapan baik infrastruktur masyarakat maupun infrastruktur fisiknya itu juga belum siap, sumber daya yang mengelola untuk membawa kearah kesitu belum punya wawasan. Pola pikir yang untuk sampai kesitu, siapa yang mendesain, harus ada acara ini setiap hari ini, terus kalau digelar secara rutin itu kira kira sumber dananya darimana dan bisa bertahan terus ada tidak, terus mendatangkan wisatawan itu bagaimana dan seterusnya itu butuh pemikiran panjang dan belum menjadi prioritas dari desa budaya disini, kita masih fokus pada pengembangan desa budaya itu.”*  
(wawancara dengan Bapak Wuryanto selaku Kasie Kemasyarakatan, tanggal 8 Februari 2017)

Desa-desa budaya juga belum memiliki sumber daya manusia atau agen pelaksana yang bisa mengarahkan kepada konsep good governance dalam pengembangan desa budaya, yang dimana desa-desa budaya ini menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan dan pengembangan kebudayaan yang ada di desa budaya. Belum adanya orang yang mengkonsep dan menjadi pelaksana dari konsep good governance ini menyebabkan kerjasama dengan pihak swasta ini hanya sebatas wacana saja, dan belum ada pelaksanaannya hingga sekarang.

Desa-desa budaya juga Belum memiliki hubungan atau relasi dengan pihak swasta juga menjadi salah satu penyebab desa budaya yang ada di Kulon Progo belum bekerjasama dengan swasta. Pengelola desa budaya sendiri juga masih kesulitan dalam mencari relasi dengan pihak swasta.



Karena dalam kerjasama dengan pihak swasta dibutuhkan penghubung untuk saling bekerjasama, dan nantinya pihak swasta ini dapat menjadi salah satu penopang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa budaya. Kerjasama antara desa budaya dengan pihak swasta masih terbatas pada saat dilaksanakannya suatu event kesenian. Pihak swasta ini baru sebatas sebagai pihak sponsor untuk beberapa event budaya yang dilaksanakan di desa-desa budaya yang ada di Kulon Progo. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Umar Sanusi ketua desa budaya Hargomulyo, yaitu :

*“Ya banyaknya swasta yang mau mendekat misalnya mau membantu, mensponsori, dan sebagainya. Tapi tetap ada yang saya tolak misalnya sponsorship gede tapi tak tolak soalnya dari rokok, alasannya karena disinikan sedang baru digencarkan kawasan tanpa rokok, muhammadiyah mengariske rokok haram. Ada-ada sifatnya baru event event tertentu, belum semacam dia menanam investasi itu belum. Dan disini kami bertekad untuk disiapkan karena sebentar lagi bandara hanya berjarak 2,5 kilo dan jalan ini akan menjadi jalan utama jadi kami harus siap, kami tidak boleh te hanyut dengan budaya asing kami tunjukkan memang budaya jogja yang istimewa.”* (wawancara dengan Bapak Umar Sanusi ketua desa budaya Hargomulyo, tanggal 23 Februari 2017)

Pada pengembangan desa budaya di Kabupaten Kulon Progo selama ini hanya dua sektor yang terlibat yaitu sektor pemerintah dan *society*. Kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh desa budaya hanya melibatkan pemerintah yaitu Dinas Kebudayaan DIY dengan desa budaya, dan tidak melibatkan sektor swasta. Sehingga untuk keterlibatan sektor swasta sendiri dalam pengembangan desa budaya masih sangat kurang. Belum adanya keterlibatan sektor swasta ini disebabkan oleh desa budaya belum memiliki relasi atau hubungan dengan pihak. Desa budaya juga belum memiliki SDM

untuk mendesain bagaimana pengembangan desa budaya ketika bekerjasama dengan swasta. Pengembangan desa budaya sendiri masih terfokus pada tahap pelestarian dan penguatan potensi kebudayaan yang dimiliki, sehingga belum ada pola pikir untuk bekerjasama dengan sektor swasta.

Dalam ketersediaan sumber daya sendiri menjadi kurang mendukung dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo. Hal ini dikarenakan kurangnya kontribusi dengan pihak swasta ini menyebabkan kurangnya anggaran dalam pengembangan desa budaya. Padahal jika melibatkan pihak swasta dalam pengembangan desa budaya ini maka pihak swasta dapat memberikan dukungan berupa pendanaan ataupun sebagai orang tua asuh dalam kegiatan kebudayaan yang ada di desa budaya. Salah satu contohnya adalah perusahaan travel. Pihak swasta ini seperti travel juga dapat mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke desa-desa budaya sehingga dapat menambah pemasukan desa dan sekaligus mengenalkan budaya-budaya yang ada dimiliki oleh desa-desa budaya tersebut. Dengan tambahan pemasukan ini kegiatan kebudayaan yang ada di desa budaya dapat berjalan secara rutin dan terus terjaga.